

WIDYA DHARMA

Jurnal Kependidikan

AN ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS' CASUAL
CONVERSATIONS: A CASE STUDY OF ENGLISH DEPARTMENT
STUDENTS OF UST

Yuyun Yulia

MINAT SISWA TERHADAP SAINS DAN IMPLIKASINYA
DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH

R. Rohandi

GENDER DALAM WACANA ILMIAH EKONOMI

Sri Hapsari Wijayanti

**KRITERIA PENYUSUNAN BUKU TEKS MATA PELAJARAN SEJARAH:
SEBUAH ALTERNATIF**

H. Purwanta

PERSetujuan PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (ASEAN-CHINA
FREE TRADE AGREEMENT)

J. Markiswo

KONSEPSI ALTERNATIF 'GAYA INTERNAL' DI ANTARA SISWA
DAN GURU FISIKA SMA

A. Atmadi

13-13



WIDYA DHARMA JURNAL KEPENDIDIKAN

adalah jurnal kependidikan yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Masyarakat Universitas Sanata Dharma, dua kali setahun: Oktober dan April. Laporan penelitian dan pemikiran tentang kependidikan. Visi Jurnal ini adalah didikan di Indonesia unggul lewat penelitian dan pemikiran yang mendalam. Laporan penelitian dan pemikiran tentang kependidikan yang inovatif dan menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun yang berbahasa Inggris ditulis sesuai dengan format yang berlaku di Jurnal Kependidikan Widya Dharma yang dimuat tidak selalu mencerminkan pandangan Redaksi.

REDAKSI

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Paul Suparno, S. J.
Redaksi: Susento
A. Herujianto
A. Supratiknya
M. M. Sri Hastuti
A. M. Slamet Soewandi
J. Bismoko

PELAKSANA

Yuliana Setyaningsih
Barli Bram
Laurentia Sumarni
Rishe Purnama Dewi

SISTEM ADMINISTRASI

Agnes Lusia Budi Asri
M. B. Rohaniwati

REDAKSI

Sanata Dharma
Jl. Pos 29, Mrican Yogyakarta 55002
Telp. (0274) 562383, Fax. (0274) 562383
Email: rma@usd.ac.id

WIDYA DHARMA JURNAL KEPENDIDIKAN

DAFTAR ISI

AN ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS' CASUAL CONVERSATIONS: A CASE STUDY OF ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS OF UST 155

Yuyun Yulia

MINAT SISWA TERHADAP SAINS DAN IMPLIKASINYA DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH..... 168

R. Rohandi

GENDER DALAM WACANA ILMIAH EKONOMI 183

Sri Hapsari Wijayanti

KRITERIA PENYUSUNAN BUKU TEKS MATA PELAJARAN SEJARAH: SEBUAH ALTERNATIF 199

H. Purwanta

PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CINA (*ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT*)..... 224

J. Markiswo

KONSEPSI ALTERNATIF 'GAYA INTERNAL' DI ANTARA SISWA DAN GURU FISIKA SMA..... 241

A. Atmadi

KRITERIA PENYUSUNAN BUKU TEKS MATA PELAJARAN

SEJARAH: Sebuah Alternatif

Oleh H. Purwanta

ABSTRACT

Industry of history textbook, since 2005, is on the hand of BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan/National Board of Education Standard). The board issues criteria of Indonesia school textbook: content, presentation, language and legibility, and layout. The criteria are so elementary. This article wants to discuss cultural inheritance, the most important aims of teaching history, as criterion. In order to infuse Indonesian cultural identity into young generation, I propose to use Pancasila as *genetivus-subyektivus* or foundation of thinking in evaluating school textbook of history. From Pancasila viewpoint, history textbook is good if majority of its contents are narrating about social justice. Hierarchically, the next focuses of history textbook are democracy, togetherness (unity), humanity, and believe in God.

KATA KUNCI

Buku teks, pewarisan, identitas kultural, Pancasila, identitas nasional

A. Pendahuluan

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496). Pada tahun yang sama, Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Pada pasal 3 ayat 1 Permendiknas tersebut diatur bahwa buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

BSNP sebagai lembaga yang dibentuk untuk menilai kelayakan buku teks menetapkan empat kriteria utama, yaitu:

- a. materi
- b. penyajian
- c. bahasa dan keterbacaan
- d. grafika

Pada bidang materi pengkajian kelayakan meliputi kekhususan materi, keakuratan dan kemutakhiran; penyajian informasi yang tidak bias, kesesuaian kosa kata, struktur

kalimat, panjang paragraf dan tingkat kemenarikan uraian dengan kognisi siswa; pencantuman rujukan yang digunakan; kesesuaian dan keakuratan ilustrasi, peta, tabel dan grafik dengan teks; kesesuaian materi dengan kurikulum; serta keseimbangan penyebaran materi, baik yang berkenaan dengan pengembangan makna dan pemahaman, pemecahan masalah, pengembangan proses, latihan dan praktik, tes keterampilan maupun pemahaman.

Penilaian aspek penyajian meliputi tujuan pembelajaran, keteraturan urutan dalam penguraian, kemenarikan minat dan perhatian siswa, kemudahan dipahami, keaktifan siswa, hubungan bahan, serta latihan dan soal. Penilaian aspek bahasa dan keterbacaan meliputi kemudahan membaca (berhubungan dengan bentuk tulisan atau tipografi, ukuran huruf, dan lebar spasi) yang berkaitan dengan aspek grafika; kemenarikan (berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide bacaan, dan penilaian keindahan gaya tulisan) yang berkaitan dengan aspek penyajian materi; serta kesesuaian (berhubungan dengan kata dan kalimat, panjang-pendek, frekuensi, bangun kalimat, dan susunan paragraf) yang berkaitan dengan bahasa dan keterbacaan. Pada bagian grafika, aspek yang dinilai adalah hal-hal yang berkenaan dengan fisik buku, antara lain: ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi.

Kriteria yang disusun oleh BSNP bersifat elementer untuk penyusunan/penilaian buku teks dan belum masuk secara mendalam pada materi, sehingga kurang mampu mengukur dan menjamin efektivitas buku teks ditinjau dari tujuan pendidikan sejarah. Terdorong oleh pemahaman tersebut, artikel ini akan difokuskan pada penyusunan alternatif kriteria materi yang disajikan oleh buku teks. Salah satu tujuan utama pendidikan sejarah adalah mewariskan identitas kultural, sehingga perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah identitas nasional. Uraian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Tujuan Kurikuler Pendidikan Sejarah
2. Identitas Nasional

B. Tujuan Kurikuler Pendidikan Sejarah

Secara kurikuler, pendidikan sejarah atau yang di tingkat persekolahan dikenal sebagai mata pelajaran sejarah, memiliki paling tidak tiga tujuan utama, yaitu pewarisan identitas, penegak kohesivitas dan progresivitas dan penguasaan keterampilan akademik.

1. Pewaris identitas kultural

Pada semua komunitas, narasi sejarah secara turun temurun difungsikan sebagai media pewaris identitas. Melalui narasi sejarah yang dilakukan, masyarakat mengharapkan generasi baru menjadi memahami siapa diri mereka dan kemana hidup harus diarahkan,

meyakini berbagai keutamaan yang dijadikan landasan untuk mengarungi dan memaknai kehidupan masa kini dan mendatang.

Salah satu contoh bagaimana masyarakat menghidupi identitasnya, dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Wotgaleh. (H. Purwanta, 2008) Mereka mengidentifikasi diri sebagai masyarakat pemberani yang tak mengenal rasa takut untuk membela kebenaran yang diyakini. Oleh masyarakat sekitar, masyarakat Wotgaleh diidentifikasi sebagai tukang berkelahi. Identitas Wotgaleh tersebut berakar dari keyakinan bahwa mereka merupakan pengikut setia Pangeran Purboyo, panglima perang sakti kerajaan Mataram dan pemilik perdikan Wotgaleh, yang tidak pernah mengenal rasa takut.

Untuk menghidupi identitas kolektifnya, masyarakat Wotgaleh membuat narasi sejarah tentang kehebatan Pangeran Purboyo yang disampaikan kepada generasi muda melalui pertemuan rutin di Masjid Sulthoni. Identitas tersebut sampai sekarang tetap dihidupi, sehingga generasi baru mereka mewarisi sikap pantang menyerah untuk meminta kembalinya kampung Wotgaleh yang telah menjadi milik Pangkalan Udara Adisucipto. Hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Eropa ketika membuat narasi sejarahnya:

Why all the emphasis on the Greeks? It is because the Greeks were the first people in ancient times who thought and acted much like us. They displayed a keen intellectual curiosity, which led to speculation on almost every subject. They also had a strong individualistic spirit, and would not accept any law, rule or fact just because somebody. (<http://www.xenohistorian.faithweb.com/index.html>)

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa penempatan semua perhatian pada Yunani adalah karena masyarakatnya merupakan komunitas pertama di masa lampau yang berperilaku seperti masyarakat Eropa pada masa kini. Masyarakat Yunani pada saat itu memiliki keingintahuan intelektual tinggi yang menjadikan berkembangnya pemikiran spekulatif di hampir semua aspek. Mereka juga memiliki semangat individualistik yang tinggi, sehingga tidak bersedia menerima peraturan atau fakta hanya karena orang lain menerimanya.

Salah satu sifat identitas kolektif adalah unik, sehingga model narasi sejarah pun bersifat unik. Masyarakat yang menempatkan individualisme, rasionalisme dan empirisme sebagai keutamaan akan memiliki model narasi sejarah yang berbeda dengan masyarakat yang menempatkan kekerabatan dan keselarasan sebagai keutamaan. Perbedaan model narasi juga dapat disimak pada masyarakat tulis dan masyarakat lisan. Pada masyarakat berbudaya tulis, orang cenderung lebih mempercayai narasi dan sumber yang berbentuk tulisan dari pada lisan. Sebagai gambaran adalah perkembangan ilmu sejarah. Pencarian sumber primer tertulis, seperti dokumen, catatan harian dan sebagainya, menjadi bagian yang sangat penting dalam ilmu sejarah. Tersendatnya perkembangan sejarah lisan di lain

pihak merupakan manifestasi dari kurangpercayaan terhadap sumber lisan. (Bambang Purwanto, 2006: Bagian 2)

Sebaliknya, pada masyarakat berbudaya lisan, orang lebih memercayai ucapan lisan dari pada tulisan. Indonesia yang pada awalnya sebagai masyarakat yang berbudaya lisan, secara turun temurun melakukan narasi sejarah secara lisan. Masyarakat dengan tekun mendengarkan tetua yang mengkisahkan riwayat cikal bakal kampung mereka saat dilakukan upacara ruwahan. Bagi anggota masyarakat yang segenerasi atau satu dua tingkat di bawah cikal bakal akan dapat secara lebih detil mengingat berbagai peristiwa yang dikisahkan oleh tetua kampung. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian sejumlah generasi, ingatan akan peristiwa detil menipis dan tergantikan oleh ingatan tentang peristiwa secara global dan akhirnya yang tertinggal adalah ingatan tentang nilai dari sebuah peristiwa yang dikisahkan. Pada tahap ini, fenomena historis yang dijelaskan sangat mungkin berubah bentuk menjadi cerita rakyat atau legenda yang tidak jarang dibumbui dengan proses mistifikasi.

Meskipun terdapat perbedaan model narasi sejarah antar kebudayaan, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewariskan identitas kultural. Dari perspektif ini, narasi sejarah akan dipandang baik oleh masyarakat apabila mampu menjadi media pewarisan identitas kolektif mereka. Narasi sejarah yang mampu menjadikan generasi baru bangga terhadap kebudayaan dan menjadi bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Ketika lembaga pendidikan berkembang dalam bentuk persekolahan, fungsi sejarah sebagai pewaris identitas kultural tetap dijalankan. Dalam konteks Pendidikan Sejarah di India, S.K. Kochhar (2008: 27 – 28) menulis sasaran umum pembelajaran sejarah antara lain:

Mengembangkan kesadaran diri: Sejarah perlu diajarkan untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri. Untuk mengetahui siapa diri kita sendiri, diperlukan perspektif sejarah. Minat khusus dan kebiasaan yang menjadi ciri khas seseorang merupakan hasil interaksinya di masa lampau dengan lingkungan tertentu. Setiap orang memiliki warisan yang unik, kombinasi antara tradisi ras, suku, kebangsaan, keluarga dan individu, yang terpadu menjadikan dirinya seperti sekarang ini. Tanpa pendalaman terhadap faktor-faktor sejarah tersebut, orang akan gagal memahami identitasnya sendiri.

Tanpa sejarah, bangsa India tidak akan tahu apa artinya menjadi orang India. Para politikus pun tidak akan sungguh-sungguh memahami untuk apa mereka menjadi pegiat partai dan transformasi apa yang sedang dilakukan oleh partainya. Tanpa sejarah, anak-anak sekarang tidak akan tahu kegigihan perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin nasional untuk memperoleh kemerdekaan dan peran yang besar dari masing-masing tokoh pada zamannya dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa sasaran umum pembelajaran sejarah, menurut S.K. Kochhar, ada dua, yaitu kesadaran akan identitas diri dan kesadaran akan arah masa depan yang harus dituju bersama. Dengan gaya bahasa yang berbeda, Hamid Hasan (1999: 8) menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan Sejarah antara lain memberi “Pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang cukup mendasar untuk digunakan sebagai dasar memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme dan sikap toleransi”. Pemahaman terhadap lingkungan sekitar dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kesadaran akan identitas lokal, sedang semangat nasionalisme dapat dipahami sebagai kesadaran akan identitas nasional.

Peran sejarah sebagai pewaris identitas kultural bukan lagi sekedar wacana. Pemerintah melalui departemen pendidikan nasional telah mencantumkannya dalam kurikulum. Hal itu dapat disimak pada dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sejarah. Dalam latar belakang dijelaskan:

Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah:

2. mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;
3. memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. (Depdiknas, 2006: 523)

2. Penegak kohesivitas dan progresivitas sosial

Selain memiliki fungsi sebagai pewaris identitas kultural, eksplanasi sejarah juga memiliki fungsi untuk menjaga kohesivitas sosial kontemporer. Dalam rangka mencapai cita-cita kolektif, masyarakat menghadapi berbagai permasalahan, baik berupa persaingan, konflik maupun perang, yang tidak jarang mengancam kepaduan kehidupan mereka sebagai komunitas. Untuk memperoleh solusi yang tepat, masyarakat akan bertanya kepada sejarah. Dalam konteks ini, eksplanasi sejarah sudah seharusnya mampu menyumbang solusi terhadap problem aktual yang sedang dihadapi. Sejarah dikodratkan menjadi basis data yang berupa kumpulan solusi semua permasalahan hidup manusia. (S.K. Kochhar, 2008: 35) Oleh karena itu, melalui koleksinya sejarah memiliki tanggungjawab untuk memberikan eksplanasi berbagai peristiwa masa lampau yang memiliki relevansi tinggi

terhadap problem aktual, sehingga masyarakat mampu mengambil langkah yang tepat dalam usaha mengembalikan kohesivitas sosialnya.

Sejarah memiliki kewajiban ikut mendorong semua lapisan masyarakat untuk menjunjung tinggi berbagai kesepakatan publik yang telah dicapai berdasar hikmat kebijaksanaan. Melalui narasi diakronisnya, sejarah memiliki kesempatan luas untuk meninjau secara kritis berbagai kesepakatan publik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kebanggaan rasional untuk mengikuti sistem yang berlaku.

Terkait dengan peran sebagai penegak dan penjaga kohesivitas atau kerukunan sosial, Hamid Hasan (1999:9) menjelaskan bahwa mata pelajaran sejarah bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, keterampilan sejarah dan nilai suatu peristiwa sejarah dalam membina kehidupan yang memerlukan banyak keputusan kritis, serta terampil dalam memahami berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di sekitarnya. Dengan kata lain, mata pelajaran sejarah sudah seharusnya memberikan wahana untuk terjadinya dialog reflektif, sehingga generasi baru mampu mengambil keputusan tepat dalam menjaga dan mengembangkan kohesivitas sosial. Sealong dengan itu, pemerintah pada Latar Belakang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sejarah menjelaskan bahwa mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis. Posisi strategis itu antara lain karena materinya yang dipandang:

- a) Mampu menjadi media penanaman kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa;
- b) sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;
- c) berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. (Depdiknas, 2006: 523)

Selain menjadi pendukung terciptanya kehidupan yang harmonis, sejarah juga bertanggungjawab atas berkembangnya masyarakat secara progresif menuju kehidupan yang dicita-citakan. Melalui narasinya, sejarah memberikan inspirasi dan peluang untuk memajukan masyarakat kontemporer. Soekarno (1965) menjelaskan:

Mempelajari sedjarah koeno dan mengkagoemi sedjarah koeno itoe hanjalah ada boeahnja jang berfaedah bagi masjarakat kita jang sekarang, djikalau kita menarik toes garisnja dynamic jang ada di dalam sedjarah itoe. Dari tingkatnja kita poenja “grootsch verleden” (red: kebesaran masa lampau) melaloei tingkatnja kita poenja “donkerheden” (red: masa kegelapan), mendaki kepada tingkatnja kita poenja

“lichtende wenkende toekomst”(red: masa depan yang gemilang)___ dengan melaloei tingkat-tingkat inilah si goeroe haroes dapat mendjelmakan garis sedjarah itoe di dalam garis hidoepnja, nafasnja djiwa sendiri. Levenlijn-nja Historie haroeslah ia djelmakan di dalam ia poenja geestelijken levenslijn (red: garis kehidupan rohaniah) sendiri, manakala ia benar-benar maoe bernama Poetera-Zaman, Rasoel Kebangoenan. Dooden-cultuur, boroboedoer-vereering (red: pemujaan Borobudur), wierook – branderij (red: pembakaran dupa) haroes evolutie. Pergaoelan hidoep akan tinggalkan dia tele-tele di dalam asapnja ia poenja kemenjan. De wore vervolger van het verleden is hij, die aan de Wet der Beweging, der Voortschojding gehoorzaamt!! (Guru sejarah harus taat pada hukum kemajuan, terus berusaha melangkah maju)

Dari kutipan di atas, Soekarno menyampaikan pandangan bahwa sejarah akan menjadi sangat bermanfaat apabila mampu memahami perkembangan jiwa jaman setiap periode sejarah. Dengan pemahaman terhadap jiwa jaman, generasi baru diharapkan mampu menempatkan diri pada periode sekarang dan menggali inspirasi dengan dilandasi kesadaran akan tanggungjawabnya menuju masa depan. Di lain pihak, Hamid Hasan (1999: 8) menjelaskan bahwa pelajaran sejarah harus mengembangkan siswa agar mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah, kemampuan menyaring nilai yang ada, memilih dan mengembangkan nilai positif dan menarik pelajaran dari nilai negatif, serta meniru keteladanan yang ditunjukkan dari para pelaku sejarah dalam peristiwa sejarah.

3. Penguasaan Keterampilan Akademik

Dewasa ini eksplanasi sejarah juga dituntut untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria akademis, sehingga uraiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kriteria ini secara kuat diwacanakan sejak kebudayaan Eropa (pada masa kini juga dikenal sebagai kebudayaan Barat) mendominasi dunia dan berbagai aspeknya ditempatkan sebagai ukuran “kebenaran universal”. Oleh karena kebudayaan Eropa antara lain menempatkan obyektivitas, rasionalitas dan empirisme sebagai kriteria kebenaran, maka sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga menempatkan ketiganya sebagai ukuran kebenaran (baca: kebaikan). Untuk mencapai sasaran ilmiahnya, yaitu penjelasan sejarah yang obyektif, rasional dan didukung dengan bukti-bukti empiris, ilmu sejarah mengembangkan berbagai cara yang terangkum dalam metode dan metodologinya.

Sealur dengan sejarah sebagai ilmu, mata pelajaran sejarah juga dituntut tanggungjawab untuk mengembangkan keterampilan akademik. Hasan (1999: 8 – 9) menjelaskan bahwa tujuan mata pelajaran sejarah antara lain adalah mengembangkan keterampilan sejarah yang dapat digunakan peserta didik dalam mengkaji berbagai

informasi yang diterima untuk menentukan kesahihan informasi, memahami dan mengkaji setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat di sekitarnya dan digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Sejalan dengan itu, pemerintah pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan tujuan pelajaran sejarah sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan
2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan
3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau
4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. (Depdiknas, 2006: 524)

Selain pada tujuan, pengembangan keterampilan akademik juga dapat disimak pada KTSP bagian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk siswa Kelas X Semester I, misalnya, ditetapkan SK-KD sebagai berikut:

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah	1.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. 1.2. Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara. 1.3. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah

Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa keterampilan akademik, seperti kemampuan menjelaskan identitas keilmuan sejarah (1.1) serta keterampilan melakukan penelitian sejarah (1.3) merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa SMA.

C. Identitas Nasional

Secara etimologis, identitas nasional merupakan penggabungan dua kata, yaitu “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang dapat dimaknai sebagai ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain. Ditinjau dari perspektif asal usul, identitas bermula dari pernyataan diri atau pemberian. Identitas yang merupakan pernyataan diri hanya berlaku pada manusia. Melalui refleksi panjang, akhirnya manusia menyadari siapa dirinya, baik ciri fisik maupun kepribadian. Kesadaran akan identitas

tersebut kemudian dinyatakan kepada pihak lain ketika bersosialisasi. Di lain pihak, identitas yang berasal dari pemberian adalah penamaan yang dilakukan manusia terhadap segala sesuatu yang diketahuinya.

Identitas memiliki fungsi sangat penting, karena memberikan penjelasan yang relatif benar dan tepat. Tanpa identitas, sesuatu akan sulit diidentifikasi dan digali informasi yang jelas, benar dan tepat. Sartono menjelaskan pentingnya identitas dengan menganalogikan pada orang yang kehilangan ingatan:

Tanpa identitas, sukar bahkan mustahil melakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya... Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus menerus. (Sartono Kartodirdjo, 2005: 114-115)

Analogi yang dikemukakan Sartono tersebut berlaku tidak hanya pada tataran individual atau perseorangan, tetapi juga pada tataran kolektif, baik keluarga, etnis maupun bangsa. Dari sudut pandang ini, tanpa memiliki identitas, bangsa akan tidak memiliki akar untuk menghidupi aktivitas, vitalitas dan kreativitasnya (Soedjatmoko pada Rochiati Wiriaatmadja, 1992: 68)

Kata kedua adalah “nasional” yang merujuk pada konsep kebangsaan. Pada kasus bangsa Indonesia, pengertian nasional secara legal dan formal berlandas pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sudut pandang ini pengertian nasional dapat diidentikkan dengan pengertian Indonesia. Tidak dipungkiri akan adanya kontroversi tentang waktu kelahiran Indonesia. Ada pandangan yang menunjukkan bahwa Indonesia baru ada pada tahun 1950 saat terjadinya pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Sebaliknya ada yang menyatakan bahwa Indonesia sudah ada sejak zaman pra sejarah.

Pandangan bahwa Indonesia sudah ada sejak zaman pra sejarah menekankan pada proses pembentukan. Dari sudut pandang ini, Indonesia dipandang tidak akan ada tanpa berawal dari kehidupan masyarakat pra sejarah di wilayah nusantara. Di pihak lain, pandangan bahwa Indonesia baru ada pada tahun 1950 menempatkan pengakuan pihak lain sebagai satu-satunya penentu keberadaan. Terhadap kontroversi tersebut, pada artikel ini proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 ditempatkan sebagai hari kelahiran Indonesia, dengan tanpa mengesampingkan proses pembentukannya yang berlangsung lama sebelumnya. Secara filosofis, identitas keindonesiaan yang telah

dinyatakan pada saat proklamasi tersebut akan tetap berlaku, meski tanpa ada pengakuan dari pihak lain.

Benedict Anderson menempatkan negara kebangsaan sebagai *imagined community* yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi komunitas imajiner. Berbeda dengan komunitas yang nyata dimana anggotanya saling kenal dan secara intensif saling berinteraksi, *imagined community* merupakan komunitas yang anggotanya secara garis besar dapat dikatakan tidak saling kenal serta tidak pernah saling bertemu dan berinteraksi secara langsung. Dari sudut pandang inilah maka negara kebangsaan ditempatkan sebagai komunitas yang “tercita dan tercipta” kan.

Penempatan negara kebangsaan sebagai komunitas yang terciptakan, karena keberadaannya dicita-citakan bersama oleh komunitas-komunitas di bawahnya. Ernest Renan mengajukan pandangan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi prinsip spiritual negara bangsa. Pertama adalah sejarah yang berisi pengalaman-pengalaman bersama dan menjadi ingatan kolektif, sehingga menumbuhkan solidaritas sebagai pewaris berbagai nilai yang dihidupi sampai sekarang dan pemilik nasib yang sama. Unsur kedua adalah keinginan untuk hidup bersama, kehendak untuk secara bersama mempertahankan dan mengembangkan berbagai warisan masa lampau:

The nation, like the individual, is the outcome of a long and strenuous past of sacrifice and devotion. Of all cults, the cult of ancestors is the most legitimate, since our ancestors have made us what we are. A heroic past of great men, of glory (I mean genuine glory): this is the social capital on which a national idea is established. To have common glories in the past and common will in the present; to have done great things together and to will that we do them again: these are the conditions essential to being a people... (Ernest Renan pada Stuart Wolf, ed., 1996: 58)

Pada kutipan di atas, Renan secara jelas menyatakan bahwa bangsa, sebagaimana perseorangan, merupakan hasil dari masa lampau yang panjang dan berat dari pengorbanan dan kebaktian. Diantara semua kebudayaan, budaya para leluhur adalah yang paling sah, karena para leluhurlah yang membuat kita seperti sekarang ini. Masa lampau orang-orang besar yang heroik merupakan modal sosial tempat bersemainya gagasan tentang negara bangsa. Memiliki kebesaran masa lampau dan semangat untuk secara bersama membuat keberhasilan besar merupakan hal yang mendasar sebagai rakyat.

Selain sebagai cita-cita bersama, negara kebangsaan juga menjadi citra bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 286) kata citra diartikan sebagai gambaran atau rupa. Gambaran tersebut bukan dalam arti nyata, tetapi lebih merupakan aktivitas mental. Pada Webster Dictionary penjelasan lebih detail diberikan untuk kata “*image*” sebagai “*a*

mental conception held in common by members of a group and symbolic of a basic attitude and orientation” atau *“a popular conception (as of a person, institution, or nation) projected especially through the mass media”*. Dalam konteks ini, citra merupakan gambaran yang mengendap pada pikiran warga bangsa tentang negara bangsa Indonesia dan dibangun melalui informasi dari media.

Media berperan sangat penting dalam penumbuhkembangan identitas nasional. Anderson yang mengkaji tentang peran media cetak dalam nasionalisme Eropa, antara lain menjelaskan sebagai berikut:

...the development of print-as-commodity is the key to the generation of wholly new ideas of simultaneity, still, we are simply at the point where communities of the type 'horizontal-secular, transverse-time' become possible. Why, within that type, did the nation become so popular? The factors involved are obviously complex and various. But a strong case can be made for the primacy of capitalism. . (Benedict Anderson, 1991: 37)

Dari kutipan tersebut dapat dipahami penjelasan Anderson bahwa perkembangan komoditas cetak merupakan kunci lahirnya generasi yang memiliki gagasan yang sungguh-sungguh baru, dimana komunitas bertipe “horizontal-sekuler, melintang waktu” menjadi mungkin diwujudkan. Faktor yang menjadikan gagasan tentang negara bangsa sangat populer pada masyarakat tipe tersebut adalah kompleks, tetapi terutama oleh keunggulan kapitalisme.

Tentu saja media cetak bukan merupakan faktor penyebab tunggal lahir dan berkembangnya nasionalisme. Pada kasus nasionalisme Indonesia yang sebagian besar rakyatnya tidak media cetak *minded*, komunikasi terjadi dalam berbagai cara, antara lain melalui media cetak, radio, rapat-rapat akbar dan berita dari mulut ke mulut.

Kesadaran sebagai warga bangsa merupakan sumber bagi lahir dan berkembangnya identitas nasional. Oleh karena negara bangsa merupakan *imagined community*, maka identitas nasional pada umumnya bersifat abstrak dan berkembang dari waktu ke waktu. Sartono Kartodirdjo berpedapat bahwa identitas nasional memiliki ciri pokok: historisitas, keunikan dan partikular. Selanjutnya dia menjelaskan:

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tidak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subyektivitas menonjol apabila identitas itu ditempatkan dalam hirarkhi identitas – humanitas – universalitas. (Sartono Kartodirdjo dalam Depdikbud, 1995: 56)

Pada masyarakat Indonesia, identitas nasional telah terkristalisasi sebagai Pancasila, yang berisi sila-sila: *Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyawaratan/perwakilan, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pada pidato dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan pandangannya Pancasila sebagai *Weltanschauung* (pandangan dunia) Indonesia merdeka:

...isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Pancasila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus menjadi *Weltanschauung* kita...saya berjuang sejak 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk *Weltanschauung* itu. Untuk membentuk nasionalis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam peri-kemanusiaan, untuk permufakatan; untuk *soziale rechtvaardigheid*; untuk ke-Tuhanan. Pancasila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun... Tetapi saya sendiri mengerti seinsaf-insafnya, bahwa tidak ada satu *Weltanschauung* dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi *realitet* dengan sendirinya. Tidak ada satu *Weltanschauung* dapat menjadi kenyataan, menjadi *realitet*, jika tidak dengan perjuangan. (Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992: 71)

Pandangan Soekarno tersebut tidak jauh berbeda dengan pengkajian akademik tentang Pancasila. Eksplorasi akademik terhadap Pancasila yang berkembang sampai saat ini adalah dua dimensi. Pertama adalah kajian yang mempelajari Pancasila. Dari sudut pandang ini, Pancasila ditempatkan sebagai obyek kajian atau *genetivus-obyektivus*, yang dikaji dan diuji secara ilmiah atau teoritis akademik. Kedua adalah pengembangan kajian yang menggunakan Pancasila sebagai landasan atau *genetivus-subyektivus*, yang berbicara dan menguji aliran atau pandangan filsafat lain. (Slamet Sutrisno dalam Slamet Sutrisno, peny., 1986: 9)

Berdasar kedua kajian Pancasila secara akademik, artikel ini diarahkan untuk menggunakan Pancasila sebagai landasan atau *genetivus-subyektivus*. Dari perspektif ini, Pancasila ditempatkan sebagai landasan berpikir untuk mengevaluasi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya sekaligus menemukembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Hal itu sesuai dengan pandangan Soejadi dan Koento Wibisono bahwa Pancasila sebagai identitas nasional atau pandangan dunia dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah seharusnya melandasi pemikiran serta sikap dan tingkah lakunya (Soejadi dan Koento Wibisono dalam Slamet Sutrisno, peny., 1986: 17), termasuk di dalamnya sikap dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan. Terkait dengan Pancasila sebagai *genetivus-subyektivus*, Koento Wibisono menjelaskan:

... Menyadari bahwa ilmu pengetahuan dapat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan ekonomi, politik dan ideologi, maka dengan meletakkan komitmennya pada pemuliaan harkat dan martabat manusia, para ilmuwan harus berani menyingkap tabir manipulasi tadi, seraya menawarkan paradigma-paradigma baru guna mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Pancasila sebagai komitmen filosofik dapat dipergunakan sebagai postulat untuk melahirkan dan mengusahakan ilmu pengetahuan yang berparadigma Indonesia. Ini berarti bahwa implikasi terhadap pengusahaan ilmu..., menuntut pada para “pengusahanya” untuk mampu melakukan kontemplasi dan refleksi yang sedalam-dalamnya – sedemikian rupa agar masalah-masalah fundamental dalam pembinaan ilmu dapat menyentuh tendensi, aspirasi, cita-cita ataupun harapan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita.” (Koento Wibisono dalam Slamet Sutrisno, peny., 1986: 40 – 41)

Secara filosofis, sila-sila Pancasila tersusun secara hirarkhis piramidal dalam urutan isi (kualitas) dan luas (kuantitas). (Kaelan, 2008: 59) Masing-masing sila Pancasila apabila ditinjau dari inti pengertian atau hakekatnya mengandung isi dan luas yang berbeda-beda, tetapi dapat disusun urutan yang hirarkhis dari yang paling abstrak sampai paling kurang abstrak atau mendekati konkrit dan dari yang mencakup paling banyak hal sampai yang mencakup paling sedikit hal.

Isi merupakan semua unsur yang termuat di dalam pengertian dari kata, sedang luas merupakan benda-benda atau realitas yang ditunjuk dengan pengertian atau kata tersebut. Hubungan antara isi dan luas dapat digambarkan sebagai: “makin ‘umum’ suatu pengertian itu, makin sedikit isinya, makin luas lingkungannya. Sebaliknya, makin banyak isinya (makin mendekati kenyataan yang konkrit) makin sempit atau terbatas luasnya.” (W. Poespoprodjo dan T. Gilarso, 1985: 47 – 50) Dengan kata lain, isi pengertian berbanding terbalik dengan luas.

Notonagoro, dalam rangka pembahasan kelima sila Pancasila, menambahkan bahwa isi pengertian memiliki empat sifat, yaitu abstrak, umum universal dan tidak berubah. Selanjutnya dia menjelaskan keabstrakan sila-sila Pancasila sebagai berikut:

Adapun istilah-istilah yang pokok adalah ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Menurut bentuknya, masing-masing terdiri atas suatu kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang dibubuhi awalan dan akhiran... mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membikin abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya. (Notonagoro, 1975: 36)

Oleh karena sifatnya yang abstrak, isi pengertian menunjuk hal-hal yang umum atau menjelaskan garis besar yang berlaku universal atau tidak terbatas pada ruang dan waktu. Semua orang dapat menerimanya sebagai kebenaran atau pengertian yang benar. Oleh

karena sifatnya yang abstrak, umum universal, maka isi pengertian berlaku secara tetap atau tidak berubah sepanjang masa.

Ditinjau dari isinya, sila-sila Pancasila akan berbentuk hirarkhis piramidal dengan Ketuhanan sebagai yang paling abstrak dan umum universal, disusul oleh kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dengan tingkat keabstrakan dan keumum-universalan yang semakin berkurang. Sebagai sila yang paling abstrak dan umum, Ketuhanan meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. (Sunoto, 1981: 82) Apabila digambarkan dalam bentuk piramida, susunan isi Pancasila akan menjadi sebagai berikut:



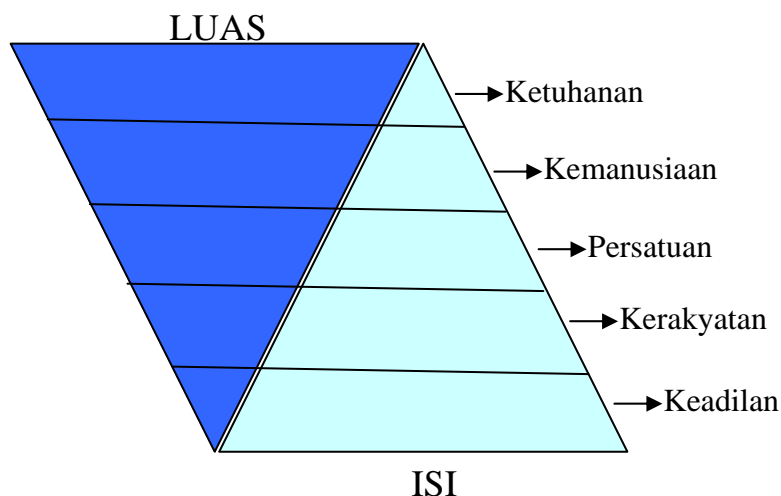
Sebaliknya luas pengertian memiliki sifat konkrit, umum kolektif dan berubah-ubah. Notonagoro (1975: 40) menjelaskan:

Pancasila tidak boleh dibiarkan saja, akan tetapi harus dilaksanakan yang maujud dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan kita... terjelmanya di dalam kenyataan keadaan dari pada Pancasila dalam konkretonya juga beraneka warna dan berbeda-beda menurut keadaan dan keperluannya. Akan tetapi tidak boleh tidak tetap harus mengandung unsur-unsur persatuan dan kesatuan, maka di dalam isinya harus terdapat pula unsur-unsur yang umum.

Berhubung dengan itu, maka berdasarkan atas isi yang abstrak, umum universal dan tetap tak berubah tadi dapat disusun juga isi daripada Pancasila sebagai pelaksanaannya dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, yaitu yang umum kolektif... Pengertian yang umum kolektif ini didalam sifat umumnya mempunyai tingkat-tingkat, tergantung daripada banyak sedikitnya unsur-unsur yang termasuk didalamnya.

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa isi dan luas berbanding terbalik, sehingga ditinjau dari luasnya sila-sila Pancasila dapat disusun secara hirarkhis berbentuk piramida terbalik. Pengertian ketuhanan memiliki luas yang tidak terbatas, karena Tuhan adalah kausa prima atau penyebab awal dari segala sesuatu. Kemudian disusul oleh sila-sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan di bawahnya yang secara hirarkhis memiliki keluasan

yang semakin terbatas. Apabila digambarkan, piramida isi dan luas sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut:



Berdasar gambaran hirarkhis piramidal sila-sila Pancasila dapat diambil pemahaman bahwa dari sudut pandang kualitas atau isi dan kuantitas atau luas, “Ketuhanan” merupakan sila yang memiliki isi yang paling abstrak dan memiliki luas yang tidak terbatas. Di sisi lain “Keadilan” menjadi pemilik isi paling konkrit dan paling sempit dari aspek keluasannya. Sebagai konsep yang paling konkrit dan sempit, “Keadilan” merupakan sila yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat sehari-hari serta paling mungkin diwujudkan dalam realitas. Oleh karena itu, pada tingkat kebangsaan sudah seharusnya sila “Keadilan” memperoleh porsi yang paling besar untuk diwacanakan dan menjadi prioritas utama untuk diwujudkan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa.

Telah banyak kajian yang dilakukan terkait dengan keadilan, baik isi maupun luasnya. Salah satu ulasan menarik disampaikan oleh A. Suryawasita (1989: 13–14):

Asas keadilan sosial menuntut agar segala produksi yang dihasilkan masyarakat dibagi merata untuk semua warga. Ini tidak berarti semua orang harus mendapat pembagian yang sama...ketidaksamaan dalam hal kekuasaan, kekayaan dan status hanya dapat dibenarkan sejauh semuanya itu sangat menguntungkan anggota masyarakat yang paling terbelakang

Dari sudut pandang hubungan antar sila, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan mengkualifikasi. (Kaelan, 2008: 61) Oleh karena itu, keadilan yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang berkerakyatan, berpersatuan, berkemanusiaan dan berketuhanan.

Dari perspektif kekonkritan kualitas atau isi dan kesempitan kuantitas atau luas, secara hirarkhis posisi ke dua sampai ke lima ditempati oleh sila Kerakyatan, Persatuan,

Kemanusiaan dan Ketuhanan. Hirarkhi tersebut juga dapat dimaknai sebagai susunan cita-cita bangsa Indonesia yang secara realistis mungkin dicapai atau diwujudkan menjadi kenyataan. Dari aspek hubungan antar sila yang saling mengisi dan mengkualifikasi, kerakyatan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah kerakyatan yang berkeadilan, bersatuan, berkemanusiaan dan berketuhanan; persatuan yang berkeadilan, berkerakyatan, berkemanusiaan dan berketuhanan; kemanusiaan yang berkeadilan, berkerakyatan, bersatuan dan berketuhanan; ketuhanan yang berkeadilan, berkerakyatan, bersatuan dan berkemanusiaan.

Dengan berlandas pada posisi keadilan sebagai sila yang paling konkrit dan paling sempit dalam identitas nasional, buku teks pelajaran sejarah sudah seharusnya disusun dengan memilih berbagai peristiwa nasional yang menarasikan wacana keadilan secara memadai. Dengan mengutamakan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarasikan wacana keadilan dalam buku teks sejarah SMA, siswa akan memahami dan menyadari bahwa mewujudkan keadilan yang berkerakyatan, bersatuan, berkemanusiaan dan berketuhanan merupakan tanggung jawab historis utama sebagai warga bangsa Indonesia. Dengan kata lain, generasi baru akan menempatkan usaha mewujudkan keadilan merupakan keutamaan tertinggi sebagai warga bangsa yang berkerakyatan, bersatuan, berkemanusiaan dan berketuhanan.

Tanpa narasi tentang keadilan yang memadai, siswa akan tidak mampu menyadari dan bersikap kritis terhadap berbagai wacana yang secara implisit maupun eksplisit mengembangkan ketidakadilan dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki pemahaman bahwa pengembangan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan akan mengorbankan keadilan, seperti dijelaskan oleh Arief Budiman (1989: 40-41) sebagai berikut:

...karena ada kepercayaan bahwa yang paling utama dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ini bisa dicapai bila kesempatan diberikan terutama kepada kelompok pengusaha, kelompok wiraswasta atau kaum borjuasi. Kelompok bawah, kelompok yang tersisih akan mengecap hasil pembangunan melalui proses penetasan kekayaan ke bawah (*trickle down effect*)...

Kalau para elit negara memiliki teori pembangunan seperti di atas, maka kesadaran untuk membantu kaum miskin tidak akan terjadi. Ini tentu saja tidak berarti bahwa negara tidak berbuat apa-apa terhadap kaum ini. Negara mungkin akan memberikan bantuan kepada mereka, tapi bantuan ini bersifat derma saja, tidak untuk memecahkan secara substansial masalah kemiskinan mereka.

Agar buku teks mata pelajaran sejarah dapat berfungsi efektif sebagai pewaris identitas nasional, wacana yang juga penting untuk dinarasikan adalah tentang kerakyatan. Banyak teori dan pandangan tentang kerakyatan yang dapat digunakan untuk menyusun

narasi historis. Salah satunya adalah pandangan Soekarno yang disampaikan dalam pidato pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945:

...Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan-perwakilan. (Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992: 66)

Dari kutipan tersebut, Soekarno berpendapat bahwa filosofi “semua buat semua” merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara yang kuat, di samping prinsip musyawarah untuk mufakat.

Dengan menarasikan wacana kerakyatan secara memadai, buku teks akan mampu menanamkan identitas nasional dalam diri generasi muda. Para siswa menjadi menyadari bahwa mewujudkan kerakyatan yang berkeadilan, berpersatuan, berkemanusiaan dan berketuhanan merupakan takdir historis mereka sebagai warga bangsa Indonesia. Mereka menjadi mau dan mampu untuk mengkritisi realitas yang berlangsung di lingkungannya dan melakukan aksi pembenahan bila terjadi penyimpangan.

Pada prioritas ke tiga, buku teks mata pelajaran sejarah juga harus menarasikan wacana tentang persatuan. Seperti juga tentang kerakyatan, banyak teori dan pandangan tentang persatuan. Soekarno dengan mengutip pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer menjelaskan pentingnya keinginan untuk bersatu dan kesamaan nasib dalam membangun persatuan nasional atau kebangsaan, di samping faktor geografi. Secara tegas dia mempertentangkan nasionalisme dengan kosmopolitanisme (Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992: 62 – 64) Dengan kalimat berbeda, Notonagoro menjelaskan pengertian persatuan sebagai usaha menyatukan rakyat dan daerah. Selanjutnya dia menjelaskan:

Mengenai sila persatuan Indonesia dapat dikatakan lebih lanjut, bahwa persatuan itu adalah kesatuan seberapa jauh dilihat atau dihubungkan dengan terjadinya, seberapa jauh merupakan hasil daripada perbuatan menyatukan, yang hasilnya merupakan kesatuan, kesatuan dalam sudut dinamikanya. Jadi yang terpenting bukannya proses terjadinya persatuan, akan tetapi hasilnya yang berupa kesatuan. (Notonagoro,1975: 50)

Pewacanaan fenomena historis tentang persatuan sangat penting agar mata pelajaran sejarah mampu menunaikan fungsinya sebagai penegak dan penjaga kohesivitas (kerukunan) dan progresivitas (kemajuan) sosial. Melalui narasi yang diwacanakan, generasi muda memiliki ruang untuk dialog dengan masa lampau kolektifnya, sehingga dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mengutamakan kerjasama sinergis yang menguntungkan semua pihak.

Prioritas selanjutnya adalah kemanusiaan. Soekarno dalam pidatonya di BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan pentingnya kemanusiaan sebagai berikut:

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania... Jangan kita berdiri di atas azas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. (Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992: 65)

Buku teks mata pelajaran sejarah sudah seharusnya mewacanakan berbagai upaya penciptaan persaudaran antar bangsa, terutama yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pewacanaan tersebut sangat penting agar dalam diri para siswa tumbuh kesadaran untuk peduli dan membantu berbagai permasalahan yang muncul di tingkat internasional. Selain itu, para siswa menjadi mampu untuk berpikir global dalam melakukan aksi sehari-hari di lingkungannya.

Prioritas ke lima adalah ketuhanan, karena sila tersebut merupakan yang paling abstrak. Oleh karena itu, ketuhanan menjadi sumber dari sila-sila lainnya. Dengan kata lain, sebagian kecil dari luas sila ketuhanan telah diuraikan dan dimasukkan ke dalam luas sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Soekarno sebagai “penggali” Pancasila berpandangan:

... Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain (*Tepuk tangan sebagian hadirin*) Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid* tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu...Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992: 65)

Dari kutipan itu, percaya kepada Tuhan sebagai kausa prima merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab yang rasional apabila kepercayaan tersebut diwacanakan oleh buku teks pelajaran sejarah.

Pewacanaan ketuhanan dalam narasi buku teks mata pelajaran sejarah diharapkan melahirkan kesadaran dalam diri generasi muda bahwa Tuhan merupakan sumber dari semesta dan segala isinya. Selain itu, narasi tersebut akan memberikan pemahaman bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat banyak ragam kepercayaan dan agama, sehingga

secara bertahap menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan jalan menghormati kebebasan orang lain dalam menyembah Tuhannya.

D. Penutup

Pendidikan Sejarah, secara kurikuler, memiliki tiga tujuan, yaitu mewariskan identitas kultural, menegakkan kohesivitas dan progresivitas, serta mengembangkan keterampilan akademik. Sejak kemerdekaan diproklamasikan, bangsa Indonesia berketetapan untuk menggunakan Pancasila sebagai identitas nasional. Dari sudut pandang ini, sudah seharusnya pendidikan sejarah mengambil tanggungjawab sebagai pewaris identitas nasional.

Untuk menunaikan tugas sebagai pewaris identitas nasional, pendidikan sejarah perlu mengembangkan paradigma dari menempatkan Pancasila yang lebih banyak sebagai *genetivus obyektivus*, ditambah dengan menempatkan Pancasila sebagai *genetivus subyektivus*. Pengembangan paradigma itu antara lain dilakukan pada penyusunan buku teks mata pelajaran sejarah yang menjadi sumber belajar utama para siswa. Dari perspektif Pancasila sebagai *genetivus subyektivus*, narasi tentang keadilan perlu memperoleh prosentase yang terbesar dalam buku teks, karena keadilan merupakan sila yang memiliki isi paling konkrit dan paling dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Secara hirarkhis, narasi buku teks kemudian diikuti oleh sila kerakyatan, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Dengan menggunakan Pancasila sebagai kriteria pemilihan materi dan perspektif analisis dalam penyusunan buku teks, siswa akan memperoleh pemahaman dan kesadaran bahwa memperjuangkan keadilan merupakan keutamaan tertinggi sebagai warga bangsa. Selain itu mereka juga akan mampu mengkritisi berbagai fenomena aktual, seperti dominasi wacana pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan mengabaikan pemerataan (keadilan).

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Benedict, 1991, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso.
- Arief Budiman, 1989, *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang Purwanto, 2006, *Gagalnya Historiografi Indonesia?!*. Yogyakarta: Ombak
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Seminar Sejarah Nasional V: Sub Tema*

- Pengajaran Sejarah. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
- Depdiknas, 2006, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sejarah. Jakarta: Depdiknas.
- Hamid Hasan, S., 1999, "Kurikulum dan Buku Teks Sejarah" dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Historia edisi I No. 1.
- Kaelan, 2008, Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kochhar S.K., 2008, Teaching History: Pembelajaran Sejarah. Terjemahan H. Purwanta. Jakarta: Grasindo.
- Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Poespoprodjo, W. dan T. Gilarso, 1985, Logika: Ilmu Menalar. Bandung: Remadja Karya.
- Purwanta, H., 2008, "Gerakan Rakyat Wotgaleh" pada Jurnal Penelitian Universitas Sanata Dharma Volume 22, No.1, April 2008
- Saafroedin Bahar dkk, et.al., 1992, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sartono Kartodirdjo, 2005, Sejak Indische sampai Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Slamet Sutrisno, peny., 1986, Pancasila sebagai Metode. Yogyakarta: Liberty.
- Soekarno, 1965, Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbitan DBR.
- Sunoto, 1981, Mengenal Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Suryawasita, A., 1989, Asas Keadilan Sosial. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiriaatmadja, Rochiati, 1992, Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Wolf, Stuart, ed., 1996, Nationalism in Europe, 1815 to Present. London: Routledge.
- <http://www.stumbleupon.com/su/5XOWZG/xenohistorian.faiithweb.com/europe/eu02.html>